

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN(BPSK) KOTA
PADANG DALAM SENGKETA PERJANJIAN SEWA
PERKARA NOMOR 46/P3K/VI/2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



1. Hj. Ulfanora SH.,M.H
2. Neneng Oktarina SH.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2016**

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG DALAM
SENGKETA PERJANJIAN SEWA PERKARA NO.46/P3K/VI/2015**

(ASYARI ARIF, 1210112030, Fakultas Hukum Unand, 60 halaman, 2016)

Pembimbing I Hj. Ulfanora SH.,MH dan Pembimbing II Neneng Oktarina SH.,MH

ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini banyak sekali kegiatan usaha atau bisnis yang berhubungan langsung dengan konsumen. Salah satunya kegiatan bisnis jasa penyewaan ruangan yang dikelola oleh swasta. Untuk mendapatkan jasa penyewaan dari pihak swasta, calon konsumen harus melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, maka lahirlah hubungan hukum diantara mereka yaitu adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya, dalam kegiatan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen, seringkali terjadi persoalan yang dapat menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak terutama konsumen seringkali dianggap sebagai pihak yang lemah berhadapan dengan pelaku usaha atau kalangan perusahaan yang dianggap lebih kuat untuk itu adanya lembaga Perlindungan Konsumen BPSK berdasarkan amanat UUPK menjamin adanya perlindungan konsumen. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara No: 46/P3K/VI/2015 antara Melviza melawan Pt. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, di BPSK Kota Padang serta Apa Pertimbangan Majelis dalam memutus Perkara No: 46/P3K/VI/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris, dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bagaimana Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Padang dilaksanakan dengan cara yang cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit serta Majelis dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan azas dan ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya dan ketentuan lain sesuai dengan UUPK. Dalam pelaksanaan putusan Majelis terlihat memiliki rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini terlihat begitu konsisten dan bertanggung jawabnya para pihak dalam melaksanakan putusan tersebut. Saran dari penulis sebaiknya Agar setiap perkara yang menjadi kewenangan dan yang dilimpahkan kepada BPSK dapat terselesaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan serta pertimbangan hukum yang jelas dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen lebih dipertegas lagi kekuatan hukumnya.